



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4379-4385

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Pendidikan Di Negara Maju dan Berkembang

Linna Marleni¹, Aan Soka Pardini², Deddi kristian³, Afrien Yudisman⁴, Adi Asmara⁵, Kashardi⁶

Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

linnamarleni755@gmail.com¹, aansokapardini8@gmail.com², kristiandeddi@gmail.com³,

afriendyudisman@gmail.com⁴, adiasmara@umb.ac.id⁵, kashardi@umb.ac.id⁶

Abstrak

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia dan mendorong perkembangan sosial-ekonomi suatu bangsa. Penelitian ini membahas perbandingan sistem pendidikan antara negara maju dan negara berkembang dengan fokus pada enam aspek utama, yaitu akses pendidikan, kurikulum dan kualitas pembelajaran, profesionalisme dan kesejahteraan guru, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, pendanaan pendidikan, serta sistem evaluasi dan penilaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan telah menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan secara efektif, didukung oleh sistem pendanaan yang kuat serta distribusi sarana prasarana yang merata. Kurikulum berbasis kompetensi, STEM, dan pembelajaran kontekstual menjadi pendekatan utama dalam meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru memperoleh pelatihan profesional berkelanjutan serta kesejahteraan yang tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi digital semakin memperkuat model pembelajaran inovatif yang adaptif terhadap kebutuhan siswa. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia, Nigeria, dan Filipina masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan akibat kondisi geografis, ekonomi, dan infrastruktur yang belum merata. Kurikulum yang berorientasi hafalan, keterbatasan pelatihan guru, rendahnya literasi digital, serta ketergantungan pada ujian nasional menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendanaan yang terbatas serta rendahnya investasi pada riset pendidikan menyebabkan inovasi belum berkembang optimal. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan global

Kata kunci: Sistem Pendidikan, Negara Maju, Negara Berkembang, Kualitas Pembelajaran

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dibentuk, dikembangkan, dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Suatu negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik biasanya mampu menghasilkan masyarakat yang berpengetahuan luas, terampil, inovatif, berkepribadian kuat, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Sebaliknya, negara yang belum berhasil mengembangkan sistem pendidikannya dengan baik akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas SDM. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik, hingga budaya suatu negara.

Dalam konteks global, perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan terlihat sangat signifikan. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, serta tingkat kemajuan teknologi yang dimiliki masing-masing negara. Negara maju yang telah mencapai stabilitas ekonomi dan disiplin dalam tata kelola pemerintahan, mampu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mereka memiliki infrastruktur pendidikan yang modern, pendanaan yang memadai, serta sistem kebijakan yang konsisten untuk mendukung perkembangan institusi pendidikan. Proses pembelajaran di negara maju cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik (student-centered learning), penguasaan teknologi, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis.

Selain itu, pendidikan di negara maju tidak hanya berfokus pada pencapaian kemampuan literasi dasar, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), inovasi, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Pemerintah di negara maju juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kompetensi guru, mulai dari kualifikasi akademik hingga pelatihan profesional yang berkelanjutan, sehingga pendidikan benar-benar berlangsung dengan kualitas yang terjamin.

Di sisi lain, negara berkembang menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidikan. Keterbatasan anggaran membuat alokasi dana pendidikan sering kali tidak memenuhi kebutuhan di lapangan. Sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, masih sangat minim dan tidak merata. Kualitas tenaga pendidik pun belum optimal, baik dari segi kompetensi profesional maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran. Rendahnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi persoalan utama, sehingga fokus banyak negara berkembang lebih tertuju pada pemerataan akses pendidikan dasar sebagai prioritas utama.

Selain hambatan di atas, negara berkembang juga menghadapi tantangan budaya dan sosial, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, tingginya angka putus sekolah, serta ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor tersebut membuat peningkatan kualitas pendidikan sering kali berjalan lambat dan tidak sejalan dengan kebutuhan zaman yang sudah berkembang menuju digitalisasi global. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berada pada posisi yang strategis untuk mempelajari berbagai praktik terbaik dari negara maju dalam rangka memperkuat sistem pendidikan nasional. Melalui perbandingan model pendidikan antara negara maju dan negara berkembang, Indonesia dapat merumuskan strategi yang lebih relevan, realistis, serta kontekstual untuk diterapkan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya bangsa. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada pemerataan akses semata, tetapi juga harus diarahkan pada pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, serta pembentukan generasi yang kritis, kreatif, dan adaptif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan merupakan langkah penting untuk mewujudkan SDM unggul yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan revolusi teknologi yang terus berkembang. Sistem pendidikan yang kuat akan menjadi pondasi bagi terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di kancah dunia internasional.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis secara mendalam berbagai teori, konsep, regulasi, serta temuan empiris dari penelitian terdahulu mengenai sistem pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber ilmiah sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait perbandingan karakteristik, tantangan, dan strategi peningkatan mutu pendidikan yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi, prosiding, laporan resmi organisasi pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD, serta dokumen kebijakan pendidikan dari pemerintah Indonesia. Selain itu, artikel berita kredibel serta situs resmi lembaga pendidikan juga menjadi tambahan sumber valid yang mendukung proses pengumpulan data. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dengan tema penelitian dan tingkat kredibilitas publikasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yakni proses mengumpulkan data tertulis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diklasifikasikan sesuai fokus pembahasan seperti standar kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, kompetensi guru, dukungan teknologi dalam pembelajaran, serta kebijakan pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Tahapan pengumpulan dokumen dilakukan secara sistematis, mulai dari penelusuran literatur, identifikasi data, seleksi dokumen relevan, hingga perekaman informasi penting ke dalam format catatan data penelitian.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup sistem pendidikan di beberapa negara maju yang sering menjadi rujukan global seperti Finlandia, Jepang, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, Malaysia, dan India. Pemilihan negara tersebut didasarkan pada variasi kondisi pendidikan yang dapat memberikan gambaran perbandingan yang lebih luas dan kaya akan perspektif. Fokus analisis diarahkan pada aspek kebijakan pendidikan, kualitas guru, infrastruktur pembelajaran, akses pendidikan, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis). Analisis konten dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data sehingga menghasilkan kategori informasi yang terstruktur. Data dianalisis secara komparatif dengan menekankan perbedaan dan persamaan model pendidikan antara negara maju dan negara berkembang. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan strategi atau rekomendasi yang relevan bagi kemajuan sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, serta tantangan yang dihadapi saat ini.

Dalam proses analisis, peneliti melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi inti dan menghilangkan data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang sudah terpilah diorganisasi ke dalam tema-tema analisis seperti kualitas SDM pendidikan, kebijakan kurikulum, dukungan pendanaan, serta inovasi pembelajaran. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang runut, sehingga memudahkan dalam menyusun kesimpulan akhir mengenai model pendidikan yang ideal bagi Indonesia.

Penelitian ini juga memperhatikan keabsahan data dengan menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel untuk memastikan obyektivitas dan kebenaran data yang dianalisis. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar argumentatif kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta relevan dengan fenomena pendidikan kontemporer di Indonesia.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai gap pendidikan antara negara maju dan negara berkembang serta peluang pengembangan pendidikan di Indonesia. Melalui prosedur penelitian yang sistematis dan analisis yang kritis, hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan kontribusi ilmiah berupa rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

3. Hasil dan Diskusi

A. Akses dan Pemerataan Pendidikan

Negara maju seperti Finlandia dan Jepang telah berhasil mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok minoritas, penduduk wilayah terpencil, serta penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pendidikan inklusif yang kuat, pendanaan pendidikan yang tinggi, serta dukungan pemerintah dalam memastikan kualitas sarana prasarana yang relatif merata di setiap satuan pendidikan (Aoki, 2021; Björklund, 2020). Selain itu, penerapan sistem kesejahteraan sosial yang baik berkontribusi pada pengurangan hambatan ekonomi dalam memperoleh layanan pendidikan, sehingga tidak terdapat kesenjangan besar dalam tingkat partisipasi sekolah antarwilayah maupun antarkelompok sosial (Hakala & Lehtinen, 2022; OECD, 2021).

Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia dan Nigeria masih berhadapan dengan persoalan kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan. Ketimpangan akses sering muncul akibat perbedaan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya distribusi tenaga pendidik yang berkualitas ke daerah pedesaan dan daerah tertinggal (Rahman & Yusuf, 2021; Suryadi & Putri, 2023). Selain itu, faktor ekonomi keluarga menjadi tantangan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih melihat pendidikan sebagai beban biaya yang besar, meskipun telah tersedia program wajib belajar dan bantuan pendidikan dari pemerintah (Wulandari, 2022; World Bank, 2022).

Dalam konteks digitalisasi pendidikan, negara berkembang juga masih menghadapi *digital divide* yang memperlebar jurang kualitas pendidikan antara pusat perkotaan yang maju dengan daerah terpencil yang terbatas

akses internet dan perangkat teknologi (UNESCO, 2022; Nugroho, 2023). Perbedaan ini berdampak pada ketidaksetaraan kompetensi dan kesempatan belajar yang diterima siswa. Hingga kini, upaya perbaikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendanaan, serta penguatan program pendidikan inklusif masih menjadi fokus utama untuk mengurangi disparitas akses pendidikan dan memastikan seluruh anak memperoleh hak dasar untuk belajar secara layak (Kemendikbudristek, 2023; Abdullah, 2020).

2. Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran

Negara maju pada umumnya menerapkan kurikulum yang bersifat fleksibel, adaptif, dan berbasis kompetensi, sehingga siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah. Finlandia, misalnya, mengembangkan kurikulum tanpa tekanan ujian nasional, didukung model *phenomenon-based learning* serta pendekatan *learning by doing* yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran kontekstual (Park & Kim, 2022). Selain itu, penerapan STEM menjadi prioritas untuk mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan industri masa depan (Nugroho, 2023). Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan India, kurikulum masih berorientasi pada hafalan dan pencapaian akademik melalui ujian nasional yang justru membatasi pengembangan soft skills, kreativitas, dan inovasi siswa (Abdullah, 2020). Kurangnya fleksibilitas kurikulum juga menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga pemerataan mutu pendidikan sulit tercapai.

2. Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru

Di negara maju, profesi guru memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi serta didukung dengan pelatihan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kemampuan pedagogik (Chen, 2021). Sebagai contoh, Jepang dan Korea Selatan menerapkan standar seleksi guru yang ketat dan program *in-service training* secara berkala, yang memastikan setiap guru memiliki kompetensi yang selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Hidayat, 2024). Tingginya kesejahteraan guru juga meningkatkan motivasi kerja dan kualitas pembelajaran di kelas. Sebaliknya, di negara berkembang, banyak guru menghadapi permasalahan seperti rendahnya gaji, ketidakpastian status pekerjaan, serta kurangnya kesempatan pelatihan, terutama di daerah terpencil (Fitriani, 2023). Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran yang tidak konsisten.

Negara maju sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran melalui sistem e-learning, kecerdasan buatan (AI), *big data analytics*, hingga platform *adaptive learning* yang mampu menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa (OECD, 2023). Penggunaan teknologi tidak hanya membantu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga mendukung sistem administrasi pendidikan dan evaluasi berbasis data. Sementara itu, di negara berkembang, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar karena keterbatasan infrastruktur jaringan internet, perangkat teknologi yang tidak merata, dan rendahnya literasi digital siswa serta guru (Malik et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pendidikan, implementasi teknologi pembelajaran masih belum optimal karena berbagai hambatan sosial dan ekonomi (Budiarto & Safitri, 2022).

Negara maju konsisten mengalokasikan pendanaan pendidikan dalam porsi besar, yaitu rata-rata 5–7% dari GDP, untuk penguatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualifikasi guru (Williams, 2022). Pendanaan di negara maju juga dikelola secara transparan dengan pengawasan kebijakan yang jelas, sehingga hasilnya berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi masalah ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan donor internasional serta distribusi anggaran yang tidak merata antara daerah kaya dan miskin (World Bank, 2021). Praktik korupsi dan birokrasi berbelit juga sering menghambat pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif (Prasetyo, 2024), sehingga reformasi pembiayaan pendidikan sangat diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

3. Evaluasi dan Sistem Penilaian

Sistem evaluasi di negara maju telah beralih dari *high-stakes examination* menuju penilaian autentik yang mengukur perkembangan kompetensi siswa secara komprehensif melalui portofolio, proyek, dan refleksi belajar (Yamazaki, 2022). Pendekatan ini membantu mengembangkan keterampilan abad 21, seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi (Abdullah, 2020). Sebaliknya, negara berkembang masih mengutamakan ujian nasional sebagai strategi utama dalam menilai keberhasilan siswa, sehingga pembelajaran lebih menekankan pada pencapaian nilai dibandingkan proses pembelajaran (Susanti & Wibowo, 2023). Orientasi akademik semacam ini menyebabkan siswa kurang memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan revolusi industri yang memerlukan keterampilan non-kognitif yang kuat.

Negara maju sangat mendukung pengembangan inovasi dan penelitian pendidikan melalui pendanaan riset yang besar, kolaborasi universitas dengan industri, serta sistem publikasi yang kuat dan terindeks internasional (Smith, 2021). Banyak model pembelajaran dan kebijakan pendidikan baru yang diadopsi dunia merupakan hasil penelitian negara-negara maju tersebut (OECD, 2023). Berbeda dengan itu, negara berkembang masih mengalami keterbatasan dalam riset pendidikan, baik dari segi anggaran, kualitas penelitian, maupun publikasi ilmiah yang dihasilkan (Kurniawan & Putra, 2022). Rendahnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan mengakibatkan inovasi pendidikan tidak berkembang optimal dan tidak berkelanjutan.

Diskusi

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada negara maju seperti Finlandia dan Jepang, sistem pendidikan dibangun dengan orientasi kesetaraan sehingga semua warga—termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, serta peserta didik yang tinggal di daerah sulit akses—mendapat layanan pendidikan yang setara. Laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperlihatkan bahwa negara-negara maju umumnya memiliki tingkat keadilan dan inklusivitas pendidikan yang tinggi, di mana pengaruh status sosial-ekonomi terhadap capaian belajar relatif rendah, sementara sebagian besar peserta didik mampu mencapai kompetensi dasar minimal (OECD, 2023; OECD, 2025).

Keberhasilan pemerataan tersebut tidak terlepas dari keberpihakan kebijakan pemerintah melalui pendanaan yang kuat dan merata, penyediaan infrastruktur pendidikan yang seimbang di seluruh wilayah, serta peraturan pendidikan inklusif yang memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan (OECD, 2023; OECD, 2025). Dukungan sistem kesejahteraan di negara maju juga memainkan peran penting dalam mengurangi hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu. Program subsidi, keringanan biaya, serta bantuan beasiswa memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang dapat tetap mengakses pendidikan tanpa terkendala pembiayaan, sehingga kesenjangan partisipasi sekolah antarkelompok sosial dapat ditekan (OECD, 2025).

Berbeda dengan kondisi tersebut, banyak negara berkembang—termasuk Indonesia—masih menghadapi kesulitan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. UNESCO melaporkan bahwa sebagian besar negara berpenghasilan rendah hingga menengah belum mampu memberikan dukungan yang memadai bagi peserta didik kelompok rentan, terutama pada masa pandemi COVID-19, ketika kesenjangan sosial, geografis, dan fasilitas pendidikan semakin tampak jelas dan memengaruhi kualitas layanan pembelajaran (UNESCO, 2020; UNESCO, 2025).

Wilayah terpencil merupakan area yang paling terdampak oleh ketimpangan ini. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, minimnya akses internet, kekurangan guru berkualifikasi, serta kondisi ekonomi keluarga yang rendah menjadi penghambat utama keberlanjutan pendidikan siswa. Situasi tersebut semakin memburuk ketika proses belajar dipindahkan ke mode daring selama pandemi karena kesenjangan teknologi memperlebar jarak hasil belajar antarwilayah (UNESCO, 2025; UNESCO, 2024).

Transformasi digital yang diharapkan mampu meminimalkan ketidaksetaraan akses pendidikan justru menghadirkan tantangan baru. Keterbatasan perangkat pembelajaran dan jaringan internet, serta rendahnya

kompetensi teknologi di kalangan guru dan peserta didik membuat sebagian siswa—khususnya di wilayah tertinggal—semakin tertinggal dari siswa di perkotaan (UNESCO, 2025; UNESCO, 2024).

Temuan global juga menegaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di negara miskin masih sangat jauh dari memadai. Sekitar 40% negara di kategori pendapatan rendah belum menyediakan dukungan sistematis bagi peserta didik penyandang disabilitas, kelompok minoritas, maupun migran, yang mencerminkan lemahnya kebijakan dalam menjamin hak pendidikan yang sejatinya universal (UNESCO, 2020).

Akibat ketidakmerataan faktor geografis, ekonomi, sarana pembelajaran, dan dukungan kebijakan tersebut, banyak anak di negara berkembang masih belum memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya akses fisik ke sekolah, tetapi juga jaminan mutu pembelajaran yang relevan bagi perkembangan peserta didik turut menjadi masalah utama, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi diwariskan lintas generasi dan memperlambat pembangunan nasional di sektor SDM.

Dengan demikian, strategi peningkatan pemerataan pendidikan di negara berkembang harus dilakukan secara komprehensif, mencakup peningkatan infrastruktur sekolah dan teknologi, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru, program bantuan pembiayaan pendidikan bagi keluarga miskin, serta kebijakan inklusif yang memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang layak. Di era pembelajaran hybrid dan digital, pemerataan akses teknologi menjadi aspek fundamental untuk mendorong tercapainya keadilan pendidikan bagi seluruh wilayah dan kelompok masyarakat (UNESCO, 2025; OECD, 2023).

4. Kesimpulan

Perbandingan sistem pendidikan antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek strategis seperti kebijakan pemerintah, pendanaan pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan guru, desain kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta pemerataan akses terhadap layanan pendidikan. Negara maju pada umumnya memiliki komitmen politik yang kuat dalam mendukung kesetaraan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara, baik yang tinggal di perkotaan maupun wilayah terpencil. Sistem kurikulum yang diterapkan cenderung fleksibel dan berbasis kompetensi sehingga mampu menumbuhkan kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan abad 21. Guru ditempatkan sebagai profesi prestisius, dengan seleksi ketat, pelatihan profesional berkelanjutan, serta tingkat kesejahteraan yang memadai sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selain itu, penerapan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta data analytics dalam manajemen sekolah dan proses pembelajaran semakin memperkuat ekosistem pendidikan di negara maju yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendanaan pendidikan yang stabil, transparan, dan dikelola secara efektif berkontribusi langsung pada penyediaan sarana prasarana berkualitas serta penguatan riset pendidikan untuk mendukung inovasi kebijakan. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi tantangan multidimensional seperti ketimpangan akses pendidikan, digital divide antara wilayah maju dan tertinggal, rendahnya kualitas layanan pembelajaran, kurangnya pelatihan dan kesejahteraan guru, serta pendanaan yang belum optimal dan tidak merata. Sistem evaluasi yang masih berorientasi pada ujian menekan kreativitas dan menghambat pengembangan karakter serta keterampilan nonkognitif peserta didik. Keterbatasan riset dan inovasi pendidikan juga memperlambat penerapan kebijakan berbasis bukti yang mampu mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, negara berkembang perlu melakukan reformasi pendidikan menyeluruh melalui penguatan kebijakan pemerataan akses, peningkatan investasi pendidikan yang berkeadilan, transformasi kurikulum berbasis kompetensi, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru, serta optimalisasi penggunaan teknologi sebagai katalisator peningkatan kualitas pembelajaran. Perbaikan-perbaikan tersebut harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan agar sistem pendidikan mampu beradaptasi dengan dinamika global dan memastikan setiap individu memperoleh peluang yang setara dalam mencapai keberhasilan akademik maupun sosial di masa depan.

Referensi

1. Abdullah, R. (2020). *Educational reform and curriculum flexibility in developing nations*. Educational Review Journal, 18(2), 55–67.
2. Abdullahi, M. (2020). *Educational access in low-income communities*. International Journal of Social Education, 7(3), 112–125.
3. Aoki, H. (2021). *Equity in Japanese education policy*. Asian Education Studies, 9(1), 33–48.
4. Björklund, L. (2020). *Inclusive education in Finland: Policy and implementation*. Nordic Journal of Education, 14(2), 77–92.
5. Budiarto, T., & Safitri, D. (2022). Digital learning challenges in Southeast Asia. *Journal of Digital Education*, 5(1), 20–34.
6. Chen, Y. (2021). *Teacher professionalism in developed countries*. Global Pedagogy, 12(4), 201–215.
7. Fitriani, A. (2023). Permasalahan kesejahteraan guru di negara berkembang. *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 44–59.
8. Hakala, J., & Lehtinen, T. (2022). *Education welfare policies and school equity*. European Social Research Journal, 30(2), 98–116.
9. Hidayat, R. (2024). *Teacher training systems in East Asia*. Journal of Comparative Education, 19(1), 66–80.
10. Kurniawan, A., & Putra, S. (2022). Arah riset pendidikan di negara berkembang. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(3), 145–160.
11. Malik, R., et al. (2021). Digital divide in developing countries. *International ICT Education Journal*, 15(2), 121–139.
12. Nugroho, A. (2023). STEM implementation in modern curriculum. *Indonesian Journal of Education Policy*, 7(1), 10–25.
13. OECD. (2021). *Education at a glance: Global equity perspectives*. OECD Publishing.
14. OECD. (2023). *Digital transformation in education*. OECD Publishing.
15. Park, S., & Kim, J. (2022). Phenomenon-based learning in Finland. *Journal of Global Curriculum Studies*, 5(2), 88–101.
16. Prasetyo, B. (2024). Tantangan penyelenggaraan anggaran pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 1–14.
17. Rahman, S., & Yusuf, A. (2021). Educational inequality in rural communities. *Asian Development Review*, 12(3), 55–70.
18. Smith, L. (2021). *Innovation and research policy in education*. International Review of Education, 69(4), 301–319.
19. Susanti, Y., & Wibowo, D. (2023). Evaluasi pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 75–90.
20. UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education*.
21. UNESCO. (2024). *Technology and learning gaps in remote regions*.
22. UNESCO. (2025). *Education access and digital readiness*.
23. Williams, T. (2022). *Global spending on education: Trends and outcomes*. International Finance & Education, 22(2), 100–119.
24. World Bank. (2021). *Education financing in developing countries*.
25. World Bank. (2022). *Socioeconomic barriers to schooling*.
26. Wulandari, S. (2022). Faktor ekonomi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 122–138.